**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP PEREDARAN
PRODUK PANGAN IMPOR TANPA IZIN EDAR
DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2020**

Oleh :**Sarah Julianti**

E-mail: sarahjulianti3@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28292
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The purpose of this research. to determine the implementation of the supervisory function and the factors that hinder the implementation of the supervisory function of the Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) on the circulation of imported food products without a marketing permit in Pekanbaru City in 2020. This research is a study that uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques in the form of interviews and documentation.

The qualitative research aims to reveal certain social situations by describing true facts. The results of this study are the implementation of the supervisory function of the Center for Drug and Food Control (BBPOM) on the circulation of imported food products without a distribution permit in Pekanbaru City in 2020 is to carry out pre-market supervision in the form of product evaluation before obtaining an official distribution number and permit from the government, so that finally declared safe and can be produced and distributed to consumers and post-markets which is carried out so that the quality, consistency of quality and product information is maintained by carrying out inspections or periodic raids on shops, supermarkets and stalls that sell these food products. As a result of the raids, action was taken for business actors who sold imported food products without a permit in the form of warnings and confiscation. Also cooperate with related agencies.

Factors that hinder the implementation of the BBPOM's supervisory function consist of internal factors in the form of a limited number of human resources and budgets that have an impact on optimizing the implementation of the supervisory function. External factors are the lack of public awareness and knowledge regarding the dangers of consuming imported food without a distribution permit and also the price of imported food which is cheaper than the price of local feed.

Keywords: Implementation of Supervision Function, Pekanbaru BBPOM, Imported Food Products, Without Circulation Permit

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2002).

Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Salah satu tanggung jawab pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakatnya adalah penyelenggaraan bidang kesehatan untuk warganya. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang termasuk kedalam bentuk pelayanan yang harus diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan".

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat adalah produk pangan yang dikonsumsi masyarakat. Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan masyarakat selain sandang dan papan. Pangan memiliki fungsi yang penting bagi masyarakat, sehingga tanpa pangan masyarakat tidak akan bertahan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pengawasan pangan ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, pengolahan dan pendistribusian telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, sehingga mendapatkan izin edar dan telah diberi label dengan jujur dan tepat. Produk olahan impor wajib mendapatkan izin masuk dan beredar di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan konsumen yang adil, maka Negara Indonesia mencakup perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal tersebut sangat penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk mematuhi, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah terlibat dalam aktivitas ekspor maupun impor dengan negara lainnya. Kebutuhan impor barang dan jasa di Indonesia dikarenakan banyak kebutuhan akan produk barang dan jasa masyarakat konsumen di Indonesia yang tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Bebasnya peredaran produk pangan olahan impor ternyata banyak diminati masyarakat, ini disebabkan karena makanan tersebut mudah didapat dan dijual bebas pada setiap toko makanan yang ada. Pada sisi lain sebenarnya harus ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, pengawasan ini dimaksudkan

agar proses perizinannya berfungsi preventif serta tidak akan merugikan masyarakat. Institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk pangan olahan impor adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

Kebutuhan akan produk pangan di suatu negara dapat dipenuhi oleh produk pangan dalam negeri maupun produk pangan luar negeri atau impor. Pada era pasar bebas saat ini produk pangan dari luar negeri dapat beredar secara bebas Indonesia. Namun, produk-produk pangan ini perlunya dilakukan pengawasan atas peredarannya untuk menjamin kesehatan masyarakat.

Di Indonesia terdapat lembaga yang memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap olahan makanan yang beredar yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, menurut Pasal 1 Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa “Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.”

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Kota Pekanbaru merupakan salah satu Balai yang diberi wewenang untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (masyarakat) terhadap penggunaan suatu produk pangan yang beresiko terhadap kesehatan. Salah satu produk pangan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat adalah produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar.

BBPOM Pekanbaru menyita produk pangan dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar. Rata-rata produk pangan yang disita berasal dari Malaysia. Produk pangan ini cukup familiar bagi masyarakat Pekanbaru seperti kue lapis Apollo, sosis, daging olahan cepat saji dan lain sebagainya. produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar ini dapat

merugikan konsumen karena bisa saja berbahaya bagi masyarakat kota Pekanbaru jika mengkonsumsi produk pangan impor tanpa izin edar tersebut (<https://news.trubus.id>).

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) terdapat beberapa Pasal berkaitan dengan masalah izin edar produk pangan impor, yaitu dalam Bab VIII tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 97, ayat (1), (2) dan (3). Bunyi Pasal 97 dan penjelasan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- 2) **Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam kemasan dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. Tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa;
 - g. Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan**
 - h. Asal usul bahan pangan tertentu.

Menurut Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan:

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memuat

keterangan paling sedikit mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Keterangan kedaluwarsa;
- h. **Nomor izin edar**; dan
- i. Asal usul bahan pangan tertentu.

Produk-produk makanan impor yang diperdagangkan masih juga terdapat yang tidak memiliki izin edar pada kemasannya produknya. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Juga hal ini dapat merugikan konsumen produk makanan impor, karena tidak memiliki izin edar kemasan produknya.

Di dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, BBPOM Kota Pekanbaru bekerja sama dengan beberapa instansi-instansi lainnya. BBPOM Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas perdagangan, Dinas koperasi dan UMKM serta Reskrimsus Polda Riau.

Masih banyak ditemukan produk pangan impor tanpa izin edar di Kota Pekanbaru, menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah (BBPOM) masih kurang ketat, selain itu juga disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak masyarakat atas produk pangan atau makanan dan minuman yang sehat, aman, dan bermutu. Oleh karena itu, maka pengawasan BBPOM Kota Pekanbaru menjadi sangat penting atas peredaran produk pangan impor tanpa izin edar ini.

Produk pangan impor harus melewati pendaftaran di Badan POM untuk mendapatkan izin masuk dan beredar di

Indonesia (Nurhayati, 2009). Namun, produk pangan impor tersebut masih terdapat juga yang tidak memiliki izin yang beredar di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi pokok penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran produk pangan impor tanpa izin edar di Kota Pekanbaru tahun 2020 ?
2. Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran produk pangan impor tanpa izin edar di Kota Pekanbaru tahun 2020?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran produk pangan impor tanpa izin edar di Kota Pekanbaru tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran produk pangan impor tanpa izin edar di Kota Pekanbaru tahun 2020.

Kerangka Teori

Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan juga merupakan usaha sadar dan sistematis untuk lebih menjamin

bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Sondang, 2009).

Pelaksanaan pengawasan haruslah berlangsung dengan efektif. Hal ini agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengawasan dapat berjalan dengan efektif apabila penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama proses pengawasan dilaporkan dengan segera agar penyimpangan tersebut dapat diatasi dan tujuan yang diharapkan dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Karakteristik dari pengawasan yang efektif, diantaranya yaitu (Handoko, 2003):

- 1.) Akurat
Informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan harus akurat. Apabila data tidak akurat dari sistem pengawasan maka dapat menyebabkan organisasi menciptakan masalah yang sebenarnya tidak dan juga organisasi mengambil tindakan yang keliru.
- 2.) Tepat waktu
Informasi yang diperoleh harus segera dikumpulkan, disampaikan dan juga dievaluasi apabila perbaikan harus dilaksanakan.
- 3.) Objektif dan menyeluruh
Informasi harus mudah dipahami dan juga bersifat objektif serta lengkap.
- 4.) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik.
Sistem pengawasan yang dilakukan harus terpusat pada bidang dimana penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
- 5.) Realistik secara ekonomis
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
- 6.) Realistik secara organisasional

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

- 7.) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Hal ini dikarenakan setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
- 8.) Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan lingkungan.
- 9.) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
Pengawasan efektif yang dilakukan harus menunjukkan, baik deteksi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
- 10.) Diterima para anggota organisasi
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Jenis-jenis pengawasan berdasarkan waktu pengawasan terdiri atas (Manullang, 2009):

- 1.) Pengawasan *Preventif* lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.
- 2.) Pengawasan *represif* adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

Publik Governance

Public governance adalah suatu konsep yang merepresentasikan kemampuan pemerintah membantu

kemampuan warga masyarakatnya secara inklusif, tanpa diskriminasi, memenuhi kepuasan individual dan kemakmuran material. Kemudian juga tentang *public governance* merujuk pada seperangkat nilai, institusi, aturan, kepercayaan dan teknologi melalui mana pemerintah dan masyarakat mengelola urusan publik untuk mencapai keteraturan sosial yang diharapkan, sesuai konstitusi negara (Wahyuningsih dan Rutiana, 2012).

Public governance mengandung sejumlah nilai etis, seperti kewarganegaraan (*citizenship*), perwakilan, akuntabilitas, persamaan, dan keadilan, serta memadukan nilai-nilai pasar seperti utilitas, kompetisi, efisiensi, kemitraan, dan profitabilitas. *Public governance* melibatkan 3 aktor pelaku utama, yaitu negara atau pemerintah (*states*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*), dan masyarakat (*society*), setiap pelaku dalam *public governance* memiliki peran dan fungsinya masing-masing (Wahyuningsih dan Rutiana, 2012).

Metode Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Format penelitian ini ialah format deskriptif yang bertujuan menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang

menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Produk Pangan Impor Tanpa Izin Edar di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pangan adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Selain itu pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, maka manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula kepada keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia, baik jasmani maupun rohani.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi pemenuhan konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi seimbang. Khususnya kota Pekanbaru yang merupakan salah satu kota yang sudah terlibat dalam aktivitas ekspor maupun impor dengan kota negara lainnya. Kebutuhan impor barang dan jasa di kota Pekanbaru dikarenakan banyak kebutuhan akan produk barang dan jasa masyarakat konsumen di kota Pekanbaru masih belum dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri.

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengawasan ini untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label, dan tepat sesuai peraturan yang berlaku.

Bebasnya peredaran produk pangan impor ternyata banyak diminati masyarakat kota Pekanbaru, ini disebabkan karena makanan tersebut mudah didapat dan dijual bebas pada setiap toko makanan yang ada. Produk pangan impor wajib mendapatkan izin masuk dan izin edar untuk dapat beredar di kota Pekanbaru. Pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Pekanbaru terhadap peredaran produk pangan impor tanpa izin edar adalah sebagai berikut:

Pengawasan Preventif (Pre Market)

BPOM adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sementara Balai Besar POM (BBPOM) adalah unit pelaksanaan teknis dari BPOM yang berkedudukan di setiap provinsi termasuk juga Provinsi Riau yang memiliki BBPOM Pekanbaru. BBPOM merupakan pelaksana teknis dari BPOM dan melakukan supervisinya pada peredaran obat dan makanan secara regional, sesuai dengan letak wilayah tugasnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) terdapat beberapa Pasal berkaitan dengan masalah izin edar produk pangan impor, yaitu dalam Bab VIII tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 97, ayat (1), (2) dan (3). Bunyi Pasal 97 dan penjelasan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan

label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.

2) **Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam kemasan dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa;
- g. **Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan**
- h. Asal usul bahan pangan tertentu.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan: Pasal 5:

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memuat keterangan paling sedikit mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Keterangan kadaluwarsa;
- h. **Nomor izin edar; dan**
- i. Asal usul bahan pangan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

diketahui bahwa setiap pangan olahan termasuk juga produk pangan impor pada labelnya wajib mencantumkan nomor izin edar. Namun, pada realitanya masih banyak produk pangan impor pada labelnya tidak mencantumkan nomor izin edarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yenita selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia BBPOM Pekanbaru diketahui bahwa : (Wawancara, 5 Agustus, 2021)

“Pelaksanaan fungsi pengawasan BBPOM Pekanbaru atas peredaran produk pangan impor tanpa izin edar ini adalah melaksanakan pengawasan pre-market dan post market. Pengawasan pre market yang dilakukan berupa evaluasi produk sebelum mendapatkan nomor dan izin edar resmi dari pemerintah, sehingga akhirnya dinyatakan aman dan dapat diproduksi serta diedarkan kepada konsumen”

Penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional..

Pengawasan sebelum memasuki pasar (*pre-market*) adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru sebelum suatu produk pangan impor memasuki pasar. BBPOM Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu dan gizi produk pangan impor sebelum beredar ke masyarakat. Pengawasan *pre market* yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru ketika pelaku usaha (importer) mengurus pendaftaran di BBPOM juga pada saat pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen dan barang di pintu gerbang pelabuhan atau bandara.

Pemberlakuan standarisasi dalam pengawasan sebelum memasuki pasar (*pre-market*) dimaksudkan memberikan spesifikasi terhadap suatu produk pangan impor yang layak untuk diedarkan dan dikonsumsi baik dari segi izin administrasi maupun fisik kemasan produk pangan impor tersebut. BBPOM memiliki mekanisme terkait dengan standar keamanan pangan, label pangan serta tata cara pelaksanaan pengawasan dari produk pangan impor dan juga mekanisme pengajuan permohonan untuk sertifikasi dan izin edar bagi setiap pelaku usaha yang ingin mendistribusikan produknya. Pengawasan yang dilakukan terhadap sebuah produk yang akan siap diedarkan selain berkaitan dengan registrasi dan izin edar, juga memperhatikan dari informasi yang dicantumkan pada produk sesuai standar yang berlaku.

Pengawasan Represif (Post Market)

Pengawasan *post market* termasuk ke dalam pengawasan represif. Pengawasan *represif* adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yenita selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia BBPOM Pekanbaru diketahui bahwa: (Wawancara, 5 Agustus, 2021)

“Pelaksanaan fungsi pengawasan BBPOM Pekanbaru atas peredaran produk pangan impor tanpa izin edar ini selain melakukan pengawasan pre-market juga melaksanakan post-market yang dilaksanakan agar kualitas, konsistensi mutu dan informasi produk tersebut tetap terjaga dengan melakukan kegiatan inspeksi atau razia secara berkala pada toko, supermarket maupun warung yang menjual produk pangan tersebut. Hasil dari razia tersebut dilakukan penindakan bagi pelaku usaha yang menjual produk

pangan impor tanpa izin berupa teguran dan penyitaan terhadap produk pangan impor tanpa izin edar tersebut”.

Pengawasan yang efektif diperlukan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik pula. Peran pemerintah khususnya BBPOM Pekanbaru di dalam pengawasan peredaran produk pangan impor tanpa izin edar merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan masyarakat kota Pekanbaru untuk menjamin kesehatan masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan. Peran BBPOM Pekanbaru sebagai lembaga yang berhak di dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran produk pangan impor tanpa izin edar.

Penyebab utama peredaran produk pangan impor tanpa izin edar ini masih ada di kota Pekanbaru adalah dikarenakan harga yang jauh lebih murah dari pada produk pangan impor yang sudah mendapatkan izin edar. Membiarkan peredaran produk pangan impor tanpa izin sama saja dengan membiarkan masyarakat kota Pekanbaru menghadapi resiko buruk, selain merugikan konsumen, juga merugikan negara dari pemasukan pajak.

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk-produk pangan impor yang di produksinya, misalnya dengan mencantumkan bahwa produk pangan impor tersebut buatan luar negeri yang di impor langsung. Selain itu juga, Provinsi Riau memiliki banyak pulau-pulau yang dekat dengan perbatasan wilayah negara asing, seperti Malaysia hal ini mengakibatkan mudahnya masuk produk pangan impor tanpa izin edar dari BPOM RI.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru terpusat pada titik-titik pengawasan strategik yaitu pusat kota Pekanbaru, namun tidak dilakukan secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok kota Pekanbaru. Tidak sampainya pelaksanaan

pengawasan ke pelosok-pelosok kota Pekanbaru disebabkan karena kurangnya jumlah SDM dan sulitnya menjangkau pelosok kota Pekanbaru yang disebabkan akses menuju ke pelosok tidak mudah dicapai.

Masih banyak masyarakat yang pengetahuannya masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk-produk pangan impor secara tepat, benar dan aman. Oleh karena itu, BBPOM Pekanbaru bertugas dalam melindungi konsumen pangan impor di Kota Pekanbaru. BBPOM Pekanbaru harus memiliki sistem pengawasan makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk pangan impor untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuda Agus Paranata Baratu selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama BBPOM Pekanbaru bahwa: (Wawancara, 24 Agustus, 2021)

“Dalam hal produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar di masyarakat, maka produk makanan tersebut akan ditarik dari pasaran dan selanjutnya akan dimusnahkan oleh BBPOM. Juga, BBPOM mengeluarkan public warning yang menyebutkan mengenai produk makanan impor ilegal tersebut”.

Mengenai *public warning* yang dikeluarkan oleh BBPOM Pekanbaru terkait dengan nama produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar ini masih belum menjangkau lapisan masyarakat luas di kota Pekanbaru. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai daftar nama produk pangan impor yang termasuk kategori ilegal yang tidak memiliki izin edar. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan sosialisasi yang efektif dari pihak BBPOM Pekanbaru terkait dengan publikasi dari *public warning* ini sehingga masyarakat luas dapat mengetahuinya dengan baik.

Kegiatan sosialisasi mengenai *public warning* terkait dengan daftar nama produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar ini juga merupakan salah satu dari bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak BBPOM Pekanbaru. Namun, kegiatan sosialisasi ini masih belum efektif dan minim dilaksanakan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru terkait dengan peredaran produk pangan tanpa izin edar ini perlu ditingkatkan. Mulai dari pemeriksaan terhadap produk makanan dan minuman impor yang beredar dilakukan secara periodik, perlu adanya peningkatan kinerja dari BBPOM untuk lebih fokus terhadap masyarakat seperti kegiatan sosialisasi dengan menyampaikan laporan kemajuan suatu kasus yang terjadi dengan jelas dan cepat tanggap, atau mempublikasikan *public warning* yang detail mengenai temuan produk yang bermasalah tersebut, sehingga masyarakat selaku konsumen memiliki pengetahuan mengenai produk pangan impor ini. Juga pihak BBPOM lebih intens dalam melakukan himbauan kepada masyarakat untuk menghindari mengkonsumsi makanan khususnya pangan impor yang tidak memenuhi kriteria kesehatan yang baik.

Pada tahun 2020 masih banyaknya produk-produk pangan impor tanpa izin edar yang beredar bebas di Kota Pekanbaru selain karena faktor-faktor dari pengawasan dari pihak BBPOM yang kurang ketat, hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya dalam mengkonsumsi pangan. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh pihak BBPOM Pekanbaru menjadi sangat penting. Masyarakat memiliki hak atas produk makanan yang sehat, aman dan bermutu. Namun peredaran produk pangan impor tanpa izin edar ini hingga saat ini masih banyak beredar bebas di Kota Pekanbaru.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Produk Pangan Impor Tanpa Izin Edar di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Salah satu penyebab banyaknya produk pangan impor masuk ke kota Pekanbaru adalah perdagangan bebas. Banyaknya cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan suatu produk agar laku dalam jumlah yang banyak, membuat pelaku usaha akan menghalalkan segala cara agar konsumen mau tidak mau harus membelinya, walaupun cara tersebut kadang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Beberapa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah memasarkan produk-produk pangan impor yaitu tidak memiliki izin edar.

Pengaturan mengenai produk olahan makanan yang sudah terdaftar dan memiliki izin edar sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana di dalamnya dimuat mengenai aturan tentang hak dan kewajiban konsumen serta larangan yang harus ditaati dalam memproduksi atau memperdagangkan suatu produk.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan BBPOM Pekanbaru terhadap peredaran produk pangan impor masih belum efektif dan memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang ditemukan di dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Faktor penghambat tersebut berupa faktor internal dari BBPOM Pekanbaru sendiri dan juga terdapat faktor eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yenita selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia BBPOM Pekanbaru diketahui bahwa: (Wawancara, 5 Agustus, 2021)

“Faktor internal penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan BBPOM Pekanbaru atas peredaran produk pangan impor tanpa izin edar ini adalah kurangnya jumlah SDM dalam BBPOM Pekanbaru, serta minimnya anggaran yang berdampak pada terbatasnya kegiatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru”.

Jumlah staff BBPOM Pekanbaru yang melakukan kegiatan inspeksi lapangan masih belum mencukupi. Hal ini tentu mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dari BBPOM Pekanbaru. Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding dengan wilayah kerja yang sangat luas, sehingga berdampak pada intensitas pengawasan dan lingkup pengawasan yang tidak dapat menjangkau ke seluruh area kota Pekanbaru. Salah satu bentuk kegiatan pengawasan dari pihak BBPOM Pekanbaru adalah kegiatan sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dari peredaran produk pangan impor ini. Namun kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BBPOM Pekanbaru berupa pemberian *public warning* bagi pelaku usaha yang kedapatan menjual produk pangan impor tanpa izin edar. Sedangkan kegiatan sosialisasi untuk ke masyarakat masih belum maksimal dilakukan dikarenakan jumlah SDM dari BBPOM Pekanbaru yang terbatas sehingga kurangnya staff untuk bagian kegiatan sosialisasi.

Anggaran yang minim juga memiliki dampak terhadap keterlaksanaan kegiatan pengawasan BBPOM Pekanbaru. Anggaran yang tidak mencukupi menyebabkan banyak kegiatan pengawasan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Khususnya dalam pengawasan ketika suatu produk pangan impor tersebut diedarkan.

Faktor penghambat berupa keterbatasan jumlah SDM dan anggaran yang dimiliki oleh BBPOM Pekanbaru menyebabkan jangkauan area pengawasan tidak dapat menjangkau secara luas. Fokus pengawasan yang dilakukan adalah pada daerah-daerah yang strategi yaitu pusat kota. Namun, apabila pengawasan ini tidak dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh kawasan Kota Pekanbaru dan tidak dapat menjangkau ke seluruh pelosok yang ada di Kota Pekanbaru maka peredaran produk pangan impor ini akan selalu ada setiap tahunnya dan beredar dengan bebas.

Pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan impor ini tidak hanya BBPOM saja yang berkewajiban melakukannya. Namun juga diperlukan kerjasama dengan instansi lain yaitu Dinas Perdagangan dalam hal membuat peraturan tentang barang beredar dan mengawasi peredaran barang tersebut. Selain itu juga diperlukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, untuk mengetahui apakah produk makanan impor tersebut telah memenuhi syarat kesehatan yang ditentukan, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pihak BBPOM Pekanbaru dan instansi terkait harus dapat mencari cara lebih efektif dan jitu untuk memutus mata rantai peredaran produk pangan impor tanpa izin edar ini.

Pengawasan BBPOM Pekanbaru yang dilakukan secara berkala namun tidak intens yang menyebabkan adanya produk pangan yang lepas dari pengawasan pihak BBPOM. Sistem pengawasan secara berkala tetapi tidak intens berpengaruh pada luas lingkup produk pangan impor yang dapat diawasi. Hal ini karena akan berpengaruh pada adanya produk pangan impor tanpa izin edar yang beredar di pasar pada saat tidak dilakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yenita selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia BBPOM Pekanbaru diketahui bahwa: (Wawancara, 5 Agustus, 2021)

“Faktor eksternal penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan BBPOM Pekanbaru atas peredaran produk pangan impor tanpa izin edar ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu produk yang memiliki izin edar dan harga produk pangan impor yang lebih murah dibandingkan dengan produk pangan local”.

Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen produk pangan impor di Kota Pekanbaru menjadi faktor penyebab banyaknya peredaran produk pangan olahan impor tanpa izin edar di Kota Pekanbaru.

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat ini juga merupakan dampak dari kurangnya kegiatan sosialisasi dari pihak terkait termasuk pihak BBPOM mengenai produk pangan impor ini. Pihak BBPOM di dalam melakukan sosialisasi hanya mencapai pelaku usaha yang dilakukan inspeksi sedangkan ke masyarakat masih belum dilakukan dengan maksimal yang disebabkan karena keterbatasan jumlah SDM dan anggaran yang tersedia oleh BBPOM Pekanbaru.

Selanjutnya, harga produk pangan impor relatif lebih murah dari pada harga produk pangan dalam negeri. Banyak masyarakat lebih memilih produk pangan impor dengan alasan harga produk pangan impor lebih murah. Produk pangan dalam negeri lebih mahal dikarenakan produk pangan olahan dalam negeri sudah melewati pemeriksaan pengujian laboratorium oleh BBPOM.

Banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terkait dengan izin edar ini. Faktor penyebab pelaku usaha melakukan pelanggaran atas penjualan produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar adalah karena faktor banyaknya permintaan dari konsumen terhadap suatu produk pangan impor yang diminati, faktor keuntungan yang didapat pelaku usaha lebih besar karena tidak memerlukan biaya

pendaftaran suatu produk pangan kepada BBPOM, kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, dan karena tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk impor, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah yang tidak efektif.

Public governance tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dan masyarakatnya untuk bertahan dalam segala tantangan global dengan tetap menjaga keberlangsungan pemerintahan, baik dari segi kehidupan ekonomi, sosial, dan juga budaya. *Public governance* BBPOM Pekanbaru selaku bagian dari pemerintahan masih belum maksimal di dalam memenuhi kepuasan individu masyarakat Kota Pekanbaru.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran produk pangan impor tanpa izin edar di Kota Pekanbaru tahun 2020 adalah melaksanakan pengawasan *pre-market* yang berupa evaluasi produk sebelum mendapatkan nomor dan izin edar resmi dari pemerintah, sehingga akhirnya dinyatakan aman dan dapat diproduksi serta diedarkan kepada konsumen dan *post-market* yang dilaksanakan agar kualitas, konsistensi mutu dan informasi produk tersebut tetap terjaga dengan melakukan kegiatan inspeksi atau razia secara berkala pada toko, supermarket maupun warung yang menjual produk pangan tersebut.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran produk

pangan impor tanpa izin edar di Kota Pekanbaru tahun 2020 terdiri faktor internal yang berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan anggaran yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan. Faktor eksternal adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait bahaya konsumsi pangan impor tanpa izin edar dan juga harga pangan impor yang lebih murah dibandingkan dengan harga pakan lokal.

Saran

1. Diperlukannya jumlah SDM dan anggaran yang mencukupi bagi pihak BBPOM agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat terlaksana dengan optimal.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak BBPOM jangan hanya bersifat berkala saja tetapi juga bersifat intens sehingga proses pengawasan terhadap peredaran produk pangan impor dapat dilakukan dengan ketat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Kepala Daerah secara Langsung*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 2*. In *Yogyakarta: BPF*.
- Herlambang, S. (2013). *Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*. Gosen Publishing.
- Manullang, M. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen (Cetakan ke-21)*. Gadjah Mada University Press.
- Nurdin, I. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Rosidin, U. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. CV Pustaka Setia.

Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia.

Sondang, P. S. (2009). *Organisasi, kepemimpinan dan Perilaku administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Wahyuningsih, D., & Rutiana. (2012). *Public Governance: Pemerintah dan Masyarakat saling Menguatkan dalam Kepedulian Sinergitas*. UNS Press.

Widjaja. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada.

Yahya, Y. (2006). *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu.

Peraturan – Peraturan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan

Artikel Ilmiah

- Angriawan, F., & Mutiarin, D. (2019). Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan Impor oleh Pedagang UMKM di Kota Pekanbaru. *Journal Of Government & Civil Society*.
- Asri. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Bersertifikat Halal. *IUS*.
- Haikal, M., & Effendi. (2018). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor tanpa Izin Edar di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(4).
- Launde, A. P. (2020). *Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Di Kota Manado (Studi Kasus Tentang Penggunaan Bahan Makanan Berbahaya Di Kota Manado)*. Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiah, & Ernawaty. (2014). Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Riau*, 1(1).
- Nurhayati, I. (2009). Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(2).
- Rahmawati, F. (2019). *Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial di Kota Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Saraswati, D. N. C. M., & Laksana, I. G. N. D. (2018). Pengawasan BPOM Terhadap Produk Makanan yang Tidak Sesuai dengan Standar Izin Edar di Kota Denpasar. *Journal History*, 6(6).
- Saribu, R. S. D. (2018). Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Penanggulangan Kejahatan Pengeedaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar di Bandar Lampung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sulistiawati, H. (2017). Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kemasan di Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*.
- Yusuf, R. (2014). *Kinerja Balai Besar POM Yogyakarta dalam Pengawasan Produk Obat dan Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Website

- Winarta, K. (2018). *BBPOM Musnahkan Pangan dan Kosmetik Ilegal Rp 3,5 Miliar*. <https://News.Trubus.Id/>. <https://news.trubus.id/baca/24735/bbpom-musnahkan-pangan-dan-kosmetik-ilegal-rp-35-miliar>